

Peranakan dan Serat Kekancingan:
Sebuah Bentuk ‘Kepengaturan’ Abdi Dalem Kraton Jogjakarta

Septi Satriani

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Gedung Widya Graha Lantai XI Jalan Gatot Subroto No. 10
Jakarta Selatan 12710
Email: septisatriani@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berisi tentang bagaimana abdi dalem dipersatukan dalam sebuah konsep *peranakan* dan *serat kekancingan*. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam *peranakan*. *Peranakan* tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem, melainkan di dalamnya terkandung makna persaudaraan dan persatuan baik dengan Raja maupun di antara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa *peranakan* dan *serat kekancingan* merupakan simbol ‘kepengaturan’ bagi abdi dalem Kraton Jogjakarta. Dengan menggunakan *peranakan* dan *serat kekancingan* maka abdi dalem Kraton Jogjakarta harus berperilaku sesuai dengan makna yang terkandung dalam kedua hal tersebut.

Abstract

This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan make different people from various background to join together as a collective of abdi dalem. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. When abdi dalem use peranakan, they should do behave according the rules inherent with it. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a concept of government because it is regulation of conduct for all of abdi dalems who were in the Kraton Jogjakarta.

Pengantar

Mudik lebaran pada tahun 2012 menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena saya sudah mengantongi kepastian mendapat beasiswa untuk menempuh S2 di bidang Antropologi di kota kelahiran saya-Jogjakarta. Kesempatan ini pun tidak saya sia-siakan karena setelah tujuh tahun tinggal di ibukota negara, baru kali ini saya bisa Sholat led bareng dengan keluarga besar di Alun-alun Utara. Hal ini bukan karena tiadanya kesempatan untuk mudik pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi karena ada kalanya saya harus berbeda dengan keluarga dalam memasuki hari raya lebaran. Kebetulan suami saya adalah warga Nahdliyin¹ sementara keluarga besar saya adalah warga Muhammadiyah.² Kebahagiaan saya

semakin lengkap manakala selepas Sholat led kami berkesempatan untuk bisa melihat lebih dekat perayaan *Garebeg* Idul Fitri yang perayaannya bersamaan dengan jatuhnya 1 Syawal 1433 H. Ada saatnya Kraton Jogjakarta memilih mengadakan perayaan *Garebeg* Idul Fitri maupun Idul Adha sehari sebelum atau setelah Sholat led dilaksanakan. Peristiwa-peristiwa ini membuat saya berefleksi bahwa hidup di Indonesia sekaligus Jogjakarta membuat saya semakin sadar bahwa sebagai orang Islam pun kami memiliki cara yang berbeda dalam menetapkan perayaan hari besar agama kami yang mungkin jarang ditemui oleh penganut agama lain di Indonesia.

Ada pemandangan menarik yang saya lihat pada perayaan *garebeg* waktu itu. Ini adalah *garebeg* yang kedua³ kalinya yang pernah saya lihat. Para *abdi dalem* dengan kussyu' menunggu di regol *brajanala* dan dengan sigap segera membukanya ketika iring-iringan sepuluh *bergodo* (prajurit) dan rombongan pembawa *garebeg* keluar dari *kemandhungan lor* menuju *siti hinggil* dan *pangelaran* terus ke alun-alun utara hingga memasuki masjid besar (Wasesowinoto 2008:11). Mereka mengenakan

¹ Nahdliyin sebutan untuk warga Islam yang menjadi pengikut NU. NU kepanjangan dari Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) sebuah organisasi yang berdirinya pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini maka KH. Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) kemudian juga dirumuskan kitab l'tiqah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kitab ini kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU dan dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang social, keagamaan dan politik.
<http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan> diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 12.45.

² Pendiri Muhammadiyah adalah KH. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad. Gerakan Muhammadiyah bertujuan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.
<http://www.muhammadiyah.or.id/content-44->

<det-tentang-muhammadiyah.html> diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 13.36.

³ Pertama kali saya melihat *garebeg* adalah ketika masih berumur 6 tahun. Waktu itu saya dibawa Bude (kakak kandung Bapak) untuk melihat *garebeg* di Alun-alun Utara.

pakaian *sorjan*⁴ berwarna biru tua dengan kain *jarik*⁵ yang *diwiru engkol*.⁶ Belakangan saya baru tahu bahwa pakaian tersebut bernama *peranakan*. Pakaian yang biasa digunakan oleh para abdi dalem ketika berada di dalam Kraton Jogjakarta. Ketika saya mendekati mereka dan bertanya seputar perayaan tersebut, mereka mempersilakan saya untuk bertanya kepada abdi dalem yang lebih senior yang berhak menjawab pertanyaan saya. Peristiwa ini kemudian memicu rasa penasaran. Siapa sebenarnya abdi dalem? Bagaimana mereka bisa menjadi abdi dalem dan apa tugasnya? Mengapa mereka harus mengenakan *peranakan* ketika masuk ke dalam Kraton Jogjakarta?

Dengan menggunakan data yang sama dalam tesis saya, saya

ingin melihat keberadaan abdi dalem dan *peranakan* dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Jika sebelumnya dalam tesis saya, keberadaan abdi dalem dan *peranakan* adalah bagian dari bagaimana Sultan merespon perubahan arena yang ada di tingkat nasional dan lokal dengan menggunakan perspektif Bourdieu, maka dalam tulisan ini saya ingin melihat dengan menggunakan perspektif Foucault

Governmentality Foucault

Foucault berpendapat bahwa sampai abad ke-18 masalah pemerintah lebih ditempatkan pada konteks umum. Untuk alasan inilah, Foucault mendefinisikan memerintah sebagai mengarahkan atau lebih tepatnya sebagai “arahan perilaku” (Lemke, 2000). Dengan kata lain, ‘*the conduct of conduct*’ Foucault adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membentuk, membimbing atau mempengaruhi perilaku seseorang atau orang (Gordon, 1991:2). Di sini Gordon menambahkan bahwa memerintah sebagai kegiatan yang menyangkut hubungan antara diri dengan diri, hubungan interpersonal swasta yang melibatkan beberapa bentuk kontrol atau bimbingan, hubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan masyarakat dan hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan politik (Gordon, 1992:3). Foucault menggunakan rasionalitas memerintah bergantian dengan seni memerintah. Memerintah adalah

⁴ Sorjan merupakan pakaian tradisi orang Jogja. Pakaian ini memiliki lengan panjang dan krah sanghai atau tegak yang menutupi leher secara keseluruhan. Di krah bagian tengah terdapat kancing baju yang terletak secara vertikal dari atas ke bawah. Biasanya kancing baju tersebut dibungkus dengan kain yang sama dengan baju *sorjan* tersebut.

⁵ Jarik adalah kain panjang bermotif batik. Kain ini biasanya digunakan oleh laki-laki dan perempuan ketika mengenakan pakaian tradisional. Cara menggunakan kain ini dililitkan di pinggang dan diikat dengan menggunakan bengkong atau lontong. Kain ini juga biasa digunakan oleh ibu-ibu untuk menggendong bayi.

⁶ Diwiru artinya dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk garis lurus yang rapi. Biasanya kain yang diwiru diikat dengan penjepit di bagian bawah sehingga ketika pemakainya berjalan akan membentuk semacam kipas. Engkol artinya bentuk wiru dengan garis yang lebih lebar dan lipatan paling depan berbentuk zig zag.

kegiatan atau praktik atau seni memerintah untuk mengetahui kegiatan apa yang mungkin akan dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukan. Dengan demikian rasionalitas memerintah berarti cara atau sistem berpikir tentang praktik pemerintahan (siapa yang mengatur, apa yang akan diatur, siapa dan apa yang akan diatur). Dari sini akan muncul beberapa bentuk kegiatan yang mudah dipikirkan dan mudah dipraktikkan dan kepada siapa ini akan dipraktikkan (Gordon, 1992:3).

Foucault menunjukkan dalam masyarakat modern, pemerintahan dipahami sebagai teknik kekuasaan yang dirancang dari hasil mengamati, memantau dan bentuk mengontrol perilaku individu melalui berbagai institusi sosial dan ekonomi seperti sekolah maupun penjara (Gordon, 1992:4). Foucault berpendapat bahwa pemerintahan/kepengaturan adalah tentang bagaimana memerintah atau mengatur. Foucault menambahkan bahwa kedaulatan yang sah tidak bisa diandalkan sebagai sarana untuk menggambarkan kekuasaan karena kekuasaan yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan itu sendiri (Gordon, 1992:7).

Governmentality merupakan gabungan kata dari 'mengatur' (gubernur) dan mentalitas (*mentallite*). Di sini Foucault menekankan saling ketergantungan antara pelaksanaan pemerintahan (praktik) dengan mentalitas yang mendukung praktik-praktik ini. Dengan kata lain,

governmentality dapat digambarkan sebagai upaya untuk menciptakan cara dimana berbagai teknik bisa dikembangkan untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku masyarakat. Untuk itu, *governmentality* adalah konsep yang mengidentifikasi hubungan pemerintah Negara (politik) dan pemerintah diri (moralitas), pembentukan subjek (genealogi subjek) dengan pembentukan negara (genealogi negara) (Fimyar, 2008: 5).

Abdi Dalem

Data mengenai abdi dalem ini sebagian besar saya ambil dari tesis saya yang berjudul "Abdi Dalem Keprajan dalam Narasi Keistimewaan Jogjakarta".⁷ Dalam literatur yang ada selama ini disebutkan hanya ada dua jenis abdi dalem yaitu punokawan dan keprajan (Haryanto 2014; Jati 2012; Hadiwijoyo 2014; Wasesowinoto 2006; Satriani 2011). Berdasarkan *Dawuh Dalem* angka 01/DD/HB.X/EHE-1932 tertanggal 29 Rejeb EHE 1932 atau 08 Nopember 1999 dikatakan bahwa"

*"...Abdi dalem yaiku sopo
wae pawongan kang
ditetepake dadi
Abdiningsung Abdine
Budaya Ngayogyakarta*

⁷ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=1000171&obyek_id=4

*Hadiningrat kanthi serat
kekancangan kraton....”*

“...Abdi dalem adalah siapa saja yang ditetapkan menjadi abdi budaya Jogjakarta Hadiningrat melalui surat keputusan Kraton...”

(KRT Adiwongso,
Pengageng Tepas
Dwarapura).

Sementara KRT Jatiningrat saat diwawancarai menekankan bahwa abdi dalem itu bukan *bature* (pembantu) Sultan. Sri Sultan HB X sangat mengerti bahwa timbul banyak pendapat mengenai keberadaan abdi dalem. Untuk menghindari permasalahan, maka Sri Sultan HB X merumuskan kembali abdi dalem sebagai abdi budaya sehingga keberadaannya disesuaikan dengan kebudayaan Jogjakarta. Apalagi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, salah satu unsur keistimewaan adalah kebudayaan⁸. Jika dijabarkan lebih lanjut tutur KRT Jatiningrat, konsep abdi kebudayaan itu diharapkan mereka bertingkah laku seperti abdi dalem.

Dalam Bab 1 Pasal 1 butir Ta (dibaca to)⁹ *dawuh dalem* angka

⁸ Wawancara dengan KRT Adiwongso 1 Oktober 2014.

⁹ Penomoran pada *dawuh dalem* ini menggunakan aksara Jawa ha na ca ra ka. Khusus untuk ayat dalam *dawuh dalem* in yang mengatur tentang abdi dalem berada di dalam bagian umum pasal 1 ayat 1 butir Ta.

01/DD/HB.X/EHE-1932 tertanggal 29 Rejeb EHE 1932 atau 08 Nopember 1999 dikatakan abdi dalem adalah siapapun yang telah ditetapkan menjadi abadinya Kraton Jogjakarta dengan *serat kekancangan*. Dalam buku karangan Wasesowinoto (2006) disebutkan bahwa abdi dalem adalah:

“...Abdi dalem puniko sok sintena tiyang ingkah sagah dados abdine budaya Ngayogyakarta Hadiningrat, sarta ditetepake kanthi serat kekancangan sih dalem makarya wenten ing papan ingkang wenten sesambetane kaliyan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dene abdi dalem reh keprajan enggeh puniko Abdi Dalem ingkang nampi bayar/gaji saking Kantor Kas Pamarintah. Abdi dalem reh keprajan minangka perangkat pemerintah, mapan makarya wenten jajaran Pemerintah Republik Indonesia.

Dene abdi dalem reh keprajan kaparingan kalenggahan dilarasake kaliyan pangkat/golongan formal Pegawai Negeri Sipil (PNS). Abdi dalem reh keprajan ingkat taksih cepeng damel (PNS) sarta ingkang sampun purna damel (pensiun), kaparingan pangkat abdi dalem

sepisanan boten langkung saking pangkat wedono (gangsalsung). Paring sih dalem pangkat sapisanan puniki minangka palenggahan pangkat kangge nglarasake serta sianu bab pranatan, tata lampah, unggah unggah, suba sita, tata krama, tata busana, tata basa, sowan/marak salebeting Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kangge anggota Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI), saged kaparingan pangkat kalenggahan abdi dalem reh keprajan. Dene pangkate dilarasake kaliyan Pegawai Negeri Sipil (PNS)...”

“...Abdi dalem adalah siapa saja orang yang sanggup menjadi abdi budaya Jogjakarta, dan ditetapkan melalui surat keputusan serta melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan Kraton Jogjakarta. Sedangkan abdi dalem keprajan adalah abdi dalem yang menerima gaji dari kantor kas pemerintah. Abdi dalem keprajan merupakan perangkat pemerintah dan bekerja dalam jajaran Pemerintah Republik Indonesia.

Abdi dalem keprajan mendapatkan kedudukan dise-suaikan dengan pangkat/golongan formal Pegawai Negeri Sipil (PNS). Abdi dalem keprajan yang masih aktif menjadi PNS atau yang sudah purna tugas (pensiun), memperoleh pangkat abdi dalem pertama kali tidak lebih dari pangkat wedono (lima jungan). Pemberian pangkat pertama sebagai dasar untuk menyesuaikan serta belajar mengenai norma atau aturan, cara berjalan, sopan santun, cara berpakaian, cara berbicara/berkomunikasi, cara menghadap/berkunjung di dalam Kraton Jogjakarta.

Untuk anggota Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa mendapatkan pangkat kedudukan sebagai abdi dalem keprajan. Pangkatnya disesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)...”

Jika merujuk pada kutipan di atas memang abdi dalem adalah siapapun yang sanggup menjadi abdi budaya Kraton Jogjakarta dan ditetapkan dengan *serat kekancingan* serta melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan Kraton Jogjakarta.

Sementara abdi dalem dalam sistem pelapisan masyarakat Jogjakarta di tahun 1900an disebut juga sebagai priyayi (Soemardjan 2009: 23) yang merupakan pegawai pemerintahan yang diangkat dari rakyat biasa.¹⁰ Fungsi abdi dalem di masa lalu adalah melaksanakan semua perintah Sultan yang disampaikan melalui kaum bangsawan. Tugas dan kewajiban dari abdi dalem adalah *ngemban dawuh dalem* atau melaksanakan perintah-perintah Sultan (Soemardjan 2009: 23) sebagai bentuk pelayanan terhadap sumber kekuasaan dalam Kesultanan Jogjakarta (Suwarno 1994: 57). Abdi dalem bertugas *ngayahi*¹¹, *nguri-uri*¹² dan menjaga eksistensi kraton Jogjakarta dengan ganjaran berupa *siti*¹³ dengan ukuran *jung*¹⁴ (Moertono 1985: 144).

¹⁰ Ini pula yang menjadi pertanyaan penulis apakah posisi abdi dalem dalam masyarakat sekarang masih bisa dikategorikan dalam pelapisan yang sama dengan masyarakat jaman dahulu.

¹¹ Ngayahi berarti melaksanakan tugas.

¹² Nguri-uri artinya melestarikan atau memelihara.

¹³ Siti artinya tanah

¹⁴ Jung adalah ukuran yang digunakan Kraton untuk menetapkan besaran atau luas tanah yang diterima oleh para abdi dalem. Ada banyak versi mengenai besaran jung ini. Salah satu sumber berpendapat bahwa satu jung kurang lebih 1000 m² sementara yang sumber lain berpendapat satu jung kurang lebih 6000 m². Dikarenakan susah untuk mencari padanan besaran jung maka kata jung tetap digunakan untuk mempermudah penjelasan. Besaran jung yang diterima oleh abdi dalem tergantung pada pangkat dan golongan yang dimilikinya. Dalam sebuah literature yang ditulis oleh Soemarsaid Moertono dikatakan 1

Sementara itu dalam terminologi kamus bahasa Indonesia *abdi* berarti bawahan, pelayan, hamba atau budak tebusan dan *dalem* berarti rumah atau istana. Jika diterjemahkan secara bebas abdi dalem adalah orang yang mengabdikan hidupnya untuk menjadi pelayan di dalam rumah atau istana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Kraton dikatakan bahwa ada dua abdi dalem¹⁵ yaitu punokawan dan *reh*¹⁶ kepatihan.¹⁷ Abdi dalem punokawan bertugas di wilayah *kutogoro/kutonegoro*, sementara abdi dalem *reh* kepatihan bertugas di wilayah *negaragung* (negari) dan *mancanegara*.¹⁸ Baik abdi dalem punokawan maupun *reh* kepatihan sama-sama melaksanakan pekerjaan Kraton Jogjakarta. Jika abdi dalem punokawan melaksanakan pekerjaan di dalam Kraton Jogjakarta (semacam departemen dalam negeri) sementara abdi dalem *reh* kepatihan

jung sama dengan 4 bahu atau sekitar 23.386 meter persegi.

¹⁵ Menurut penuturan narasumber yang penulis temui pembagian dua abdi dalem ini sudah ada sejak Panembahan Senopati. Jika mengacu pada konsep abdi dalem sebagai birokrasi pemerintahan seperti yang dituturkan oleh Soemarsaid maka konsep abdi dalem *reh* kepatihan atau keprajan ini telah ada sejak abad XVI. Lihat juga literature yang ditulis HJ De Graaf tentang keberadaan abdi dalem yang duduk melingkar di depan regol istana ketika Jan Vos datang ke Kraton pada tahun 1624.

¹⁶ Reh artinya wilayah.

¹⁷ Wawancara dengan KRT WW 16 April 2014 di Kraton Yogyakarta.

¹⁸ Wawancara dengan KRT WW 18 April 2014.

melaksanakan pekerjaan di luar Kraton Jogjakarta (semacam departemen yang bertugas menjembatani Kraton dengan wilayah-wilayah di luar kraton). Ini pula yang kemudian membedakan tempat pengambilan *kekucah*¹⁹ dimana abdi dalem punokawan mengambil *kekucah* di dalam Kraton sementara abdi dalem *reh* kepatihan di Kepatihan meskipun sumber dana sama-sama berasal dari Kraton Jogjakarta. Belakangan abdi dalem *reh* kepatihan ini berganti nama menjadi abdi dalem keprajan pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Abdi dalem punokawan adalah seseorang yang mendaftarkan diri secara langsung ke Kraton Jogjakarta untuk menjadi abdi dalem melalui jalur umum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kraton Jogjakarta yaitu memiliki kepandaian tertentu seperti menari, mendalang, memainkan gamelan dan sebagainya. Abdi dalem ini memiliki tugas pokok dan gaji sesuai dengan pangkat dan kedudukan (*kalenggahan*) dalam tata rakit pemerintahan Kraton Jogjakarta.

Para abdi dalem ini berhak mendapatkan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat dalam abdi dalem adalah *minggah pangkat ajeg* dan *minggah pangkat mirunggan* (Wasesowinoto 2006: 3). *Minggah pangkat ajeg* didasarkan pada terpenuhinya bakti dan pekerjaan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sementara *minggah pangkat mirunggan* adalah kenaikan pangkat yang diberikan oleh Ngarso Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwono X karena dipandang memiliki prestasi lebih dari kewajiban yang harus diemban sebagai abdi dalem sehingga mampu mengharumkan dan meluhurkan Kraton Jogjakarta. Meskipun pangkat dapat naik secara berkala maupun karena kebaikan Sultan tetapi dua pangkat tertinggi (bupati nayaka dan KPH) menjadi hak preogatif Sri Sultan Hamengku Buwono X (*mirunggan*). Abdi dalem punokawan berhak mendapat '*kalenggahan*' dan menyandang gelar serta nama pemberian kerajaan yang diberikan kepada mereka (Wasesowinoto 2004: jilid 2).

Berbeda dengan punokawan, abdi dalem keprajan adalah abdi dalem yang berasal dari pegawai pemerintah.²⁰ Berdasarkan keterangan salah satu abdi dalem²¹ keberadaan abdi dalem keprajan dipandang sebagai jalan tengah yang memungkinkan dalam menghadapi perubahan jaman. Para abdi dalem keprajan ini kemudian diharapkan mampu menyokong administrasi Kraton karena keahlian yang mereka miliki. Mereka dapat mengajukan gelar kepangkatan yang berlaku dalam sistem pemerintahan kerajaan. Dalam memberikan gelar

²⁰ Wawancara dengan KMT MRB beberapa waktu lalu di Yogyakarta.

²¹ Wawancara dengan KMT MN beberapa waktu lalu di Yogyakarta.

¹⁹ Kekucah adalah upah atau gaji.

keangkatan kepada Abdi dalam keprajan, Kraton Jogjakarta berpijak pada sistem keangkatan yang berlaku dalam sistem keangkatan pegawai pemerintah RI. Jika seseorang mengajukan diri menjadi abdi dalam keprajan maka golongan yang dimiliki dalam jenjang keangkatan pegawai pemerintah RI yang dijadikan pijakan untuk memberi pangkat dalam sistem kerajaan Jogjakarta. Abdi dalam keprajan tidak menerima gaji berkala seperti layaknya abdi dalam punokawan. Tidak juga *kalungguhan*.²² Namun mereka berhak memiliki gelar dan nama pemberian dari Kraton Jogjakarta. Abdi dalam keprajan ini juga dilekati kewajiban mengikuti beberapa kegiatan seperti *sowan* yang terdiri dari *pasowanan padintenan*, *pasowanan Jamasi Kagungan Dalem Pusaka*, *Pasowanan Muludan*, *Pasowanan Ngabekten*, dan *Pasowanan murgan* (insidental).

Pasowanan bagi abdi dalam keprajan ini menjadi wujud 'kepatuhan' terhadap Kraton Jogjakarta. Pakaian yang digunakan sewaktu *pasowanan* adalah pakaian *peranakan* (kain jarik, sorjan lurik, lontong, keris). *Pasowanan* dilakukan secara bergilir dari hari Senin hingga Minggu dua kali setiap selapan hari. Satu kelompok *sowan* terdiri dari 30-40 abdi dalam. *Pasowanan* ini diharapkan mampu memberi kesan kepada dunia luar

bahwa Kraton Jogjakarta masih eksis.²³ Kenaikan pangkat abdi dalam keprajan sama dengan abdi dalam punokawan yaitu dengan mendasarkan pada sikap dan perilakunya yang baik (Wasesowinoto 2004: Jilid 2). Khusus untuk mereka yang masih aktif bekerja di instansi pemerintahan maka bisa mengajukan kenaikan pangkat setelah empat tahun dengan menyertakan prestasi (presensi) dari instansi yang bersangkutan di mana abdi dalam tersebut bekerja.

Peranakan dan Serat Kekancingan

Peranakan adalah pakaian resmi yang disyaratkan kepada setiap abdi dalam ketika mereka akan melakukan *pasowanan* di dalam Kraton Jogjakarta. Keberadaan *peranakan* tidaklah lepas dari *pasowanan*. Lantas apa sebenarnya *peranakan* itu. Apakah *peranakan* sekedar pakaian seragam bagi abdi dalam ataukah lebih dari itu?. Berdasarkan penuturan KRT Jatiningrat, konsep pakaian *peranakan* tidak lepas dari filosofi tentang persaudaraan. Menurut penuturannya, Kraton itu sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan yang disimbolkan dengan *golong gilig* atau bulat sempurna dan tidak ada sudutnya. Ini kemudian disimbolkan dalam pakaian para abdi dalam saat ini. Harapan atau simbol doa dari pakaian itu adalah para abdi dalam merasakan sesuatu

²² Menurut narasumber hal ini dikarenakan abdi dalam keprajan telah menerima gaji dari pemerintah.

²³ Wawancara dengan KRT WW 21 April 2014.

yang lebih yaitu persaudaraan yang sangat mendalam.

Peranakan itu persaudaraan. *Peranakan* itu adalah bagian penting dalam tubuh seorang ibu (rahim). Tidak ada satupun orang yang lahir di dunia ini yang belum pernah lewat situ. Artinya satu saudara. Hal ini memperjelas arti golongan gilig yang mengedepankan persatuan kesatuan ini. Disitu pakaian peranakan itu biru tua. Artinya dalam. Si pemakai mengenakannya secara mendalam. Polanya atau liriknya itu tiga empat tiga empat. Itu telupat. Lurik telupat itu seperti itu. Pakaian para abdi dalem itu lurik telupat artinya kewulu minongko perpat artinya dipersaudarakan antara satu dengan yang lain. Persaudaraan yang paling tinggi di sini adalah bersaudara dengan sultan. Maka sultan tidak pernah menganggap abdi dalem itu sebagai pembantu. Tetapi sebagai konco maka sebutannya satu dengan yang lain itu co. "saking pundi co". "Saweg menopo co". (KRT Jatiningrat, *Pengageng* Tepas Dwarapura).

Konsep persaudaraan ini diambil sebagai filosofi dalam abdi dalem. Berdasarkan penjelasan KRT Jatiningrat bahwa mereka masuk menjadi abdi dalem otomatis dijadikan 'saudara'nya (kerabat) Kraton. Persaudaraan ini dibangun dalam nalar '*peranakan*' atau rahim. Artinya bahwa para abdi dalem 'dianggap' lahir dari rahim yang sama. Konsep ini adalah bentuk strategi Sultan agar para abdi dalem yang sebenarnya berasal bukan dari rahim yang sama merasa dipersaudarakan dengan Raja dan antar mereka.

Dalam konsep kekerabatan di Jawa, istilah kerabat merujuk pada pertalian kekeluargaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Biasanya sistem kekerabatan ini terbatas pada asas kegunaan yang nyata dalam pergaulan, pengenalan dan daya ingat seseorang serta tidak tergantung pada sistem normatif atau konsepsi sehingga wujud jaringan kekerabatan akan berbeda antara keluarga Jawa yang satu dengan lainnya (Koentjaraningrat 1984:153). Jika mengacu pada konsep sistem kekerabatan Jawa maka keberadaan persaudaraan ini dilakukan karena ada kegunaan yang bisa diraih dari sistem atau konsep ini.

Seperti halnya sistem kekerabatan pada umumnya, sistem kekerabatan Jawa juga mempunyai fungsi memberikan semacam identitas kepada warganya, serta meninggikan kedudukan sosial

maupun gengsinya (Koentjaraningrat 1984: 154). Di sini berarti abdi dalem melalui sistem persaudaraan yang dikondisikan oleh Kraton memiliki tujuan sebagai pembentuk sebuah identitas. Maka tidak heran Kraton juga membuat semacam bahasa tersendiri yang berlaku sebagai bahasa komunikasi para abdi dalem ketika berada di dalam Kraton. Namun dalam keseharian, tidak tertutup kemungkinan Bahasa *bagongan* juga mereka gunakan sebagai bahasa komunikasi di luar Kraton Jogjakarta. Kesimpulannya ketika seseorang menjadi abdi dalem, sebenarnya mereka sedang dipersaudarakan satu dengan yang lain serta dipersaudarakan dengan Kraton. Artinya ketika telah dipersaudarakan maka mereka juga wajib 'tunduk' pada segala perintah dan peraturan yang berlaku di Kraton Jogjakarta. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pakaian *peranakan* tidak sekedar identitas bagi abdi dalem Kraton Jogjakarta melainkan dia simbol 'persaudaraan' diantara para abdi dalem dan antara abdi dalem dengan Kraton Jogjakarta. Dengan mengenakan pakaian *peranakan* maka abdi dalem dilekati hak dan tanggung jawab yang menyertai pakaian *peranakan* tersebut.

Serat kekancingan adalah semacam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kraton Jogjakarta. Biasanya dalam *serat kekancingan* terdapat informasi mengenai mengapa *serat kekancingan* tersebut dikeluarkan, ditujukan kepada siapa

serat kekancingan tersebut dan konsekuensi yang ditimbulkan dari diterimanya *serat kekancingan* tersebut. *Serat kekancingan* ini bersifat legal dan mengikat penerima *serat kekancingan*. Seperti misalnya dalam hal hak untuk menggunakan tanah milik Kraton Jogjakarta. Si penerima hak sebelumnya harus mengantongi *serat kekancingan* sebagai membuktikan bahwa memang dia adalah benar yang ditunjuk oleh Kraton Jogjakarta sebagai pemegang hak untuk menggunakan tanah milik Kraton Jogjakarta. Terkait dengan abdi dalem, maka *serat kekancingan* ini menjadi bukti bahwa yang namanya tertera dalam *serat kekancingan* tersebut adalah benar abdi dalem dengan nama tertentu dan berhak menerima gelar tertentu dan konsekuensi tertentu pula.

Peranakan dan Abdi Dalem Kraton Jogjakarta: Sebuah Bentuk 'Kepengaturan'

Foucault menunjukkan dalam masyarakat modern, pemerintahan dipahami sebagai teknik kekuasaan yang dirancang dari hasil mengamati, memantau dan bentuk mengontrol perilaku individu melalui berbagai institusi sosial dan ekonomi seperti sekolah maupun penjara (Gordon, 1992:4). Foucault berpendapat bahwa pemerintahan/kepengaturan adalah tentang bagaimana memerintah atau mengatur.

Governmentality merupakan gabungan kata dari 'mengatur'

(gubernur) dan mentalitas (mentalite). Di sini Foucault menekankan saling ketergantungan antara pelaksanaan pemerintahan (praktik) dengan mentalitas yang mendukung praktik-praktik ini. Dengan kata lain, *governmentality* dapat digambarkan sebagai upaya untuk menciptakan cara dimana berbagai teknik bisa dikembangkan untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku masyarakat.

Dalam kaitannya dengan abdi dalem, *serat kekancingan* adalah semacam legalitas yang menandakan bahwa abdi dalem adalah bagian dari warga Kraton Jogjakarta. Melalui *serat kekancingan*, Kraton Jogjakarta berhak mengatur, memantau dan mengontrol para abdi dalem. *Serat kekancingan* ini menjadi dasar kepengaturan bagi abdi dalem. Artinya hak dan tanggung jawab yang harus diemban oleh abdi dalem tergantung pada posisi *kalenggahan* masing-masing abdi dalem. Dan melalui *serat kekancingan* ini pula abdi dalem berhak menyandang gelar, nama pemberian, *kekucah*, dan *kalenggahan* yang mencerminkan pangkat dan posisi abdi dalem dalam struktur yang ada dalam Kraton Jogjakarta. Sementara tanggung jawab yang harus diemban abdi dalem adalah bertindak sebagai abdi budaya. Artinya mereka adalah orang yang mengabdikan hidupnya untuk menjadi 'penjaga' budaya Kraton Jogjakarta yang mampu *ngayahi* dan *nguri-nguri* budaya Kraton Jogjakarta.

Selain itu tugas abdi dalem adalah *sowan* untuk menunjukkan rasa bakti mereka terhadap Kraton Jogjakarta. Kehadiran dan kerajinan dalam *sowan* menjadi salah satu parameter untuk kenaikan pangkat dan *kalenggahan*. Mereka bertugas *sowan* sesuai dengan jadwal yang telah

**Tabel 1. Pranatan Kalenggahan Angka 01/Pran/KHPP/XII/2004
Bab Pangkat Abdi Dalem
15 Dulkaidah Wawu 1937 Suryo Kaping 27 Desember 2004**

Urutan		Pangkat	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		POLRI	TNI
Puno-kawan	Ke-prajan		Pangkat	Gol		
1.	1.	KPH			Jendral	Jendral
2.	2.	Bupati Nayaka	Pembina Utama	IV/e	Komjen	Letjen
3.	3.	Bupati Kliwon	Pem. Utm. Mad	IV/d	Irjen	Mayjen
4.	4.	Bupati Sepuh	Pem. Utm. Mud	IV/c	Bridjen	Brigjen
5.	5.	Bupati Anom	Pembina I Pembina	IV/b IV/a	Kombes AKBP Kompol	Kolonel Letkol Mayor
6.	6.	Riyo Bupati Anom	Penata I Penata	III/d III/c	AKP Iptu Ipda	Kapten Lettu Letda
7.	7.	Wedono	Penata Muda I Penata Muda	III/b III/a	Aiptu Aipda	Pem. Lettu Pem. Letda
8.	8.	Penewu	Pengatur I Pengatur	II/d II/c	Bripka Bridpol	Serma Serka
9.	9.	Lurah	Pengatur Muda I Pengatur Muda	II/b II/a	Briptu Bripda	Sertu Serda
10.	10.	Bekel	Juru I Juru	I/d I/c	Aj.Brip Aj. Briptu Aj. Bripda	Kopka Koptu Kopda
11.	11.	Jajar	Juru Muda I Juru Muda	I/b I/a	Bharaka Bharatu Bharada	Praka Pratu Prada

Sumber: KRT Adiwongso

Tabel 2. Pranatan Kalenggahan Angka 01/Pran/KHPP/I/2006

**Bab Pangkat Abdi Dalem
27 Besar Jumakir Wawu 1938 Suryo Kaping 27 Januari 2006**

Urutan	Pangkat	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		TNI	POLRI	
		Pangkat	Gol			
1.	Pangeran Sentono			Jendral	Jendral	
2.	Bupati Nayaka	Pembina Utama	IV/e	Letjen	Komjen	
3.	Bupati Kliwon	Pem. Utm. Madya	IV/d	Mayjen	Irjen	
4.	Bupati Sepuh	Pem. Utm. Muda	IV/c	Bridjen	Brigjen	
5.	Bupati Anom	Pembina I	IV/b	Kolonel	Kombes	
6.	Riyo Bupati Anom	Pembina	IV/a	Letkol	Ajun Kombes	
7.	Wedono	Penata I	III/d	Mayor	Komisaris	
8.	Kliwon	Penata	III/c	Kapten	Ajun Komisaris	
9.	Lurah	Penata Muda I	III/b	Let Tu/Da	Ip Tu/Da	
10.	Bekel Sepuh	Penata	III/a	Pembantu Tu/Da	Let Ajun Tu/Da	Ip
11.	Bekel Anom	Pengatur	II dcba	Sersan	Brig K/Brip	
12.	Jajar	Juru	I dcba	Kopral/Prajurit	Ajun Brip/ Bhara	

Sumber: KRT Wasowinoto

ditetapkan oleh *pranatan* yang ada. Di sini kehadiran abdi dalem dalam melakukan *sowan* akan dicatat dan diurus oleh *tepas dwarapura* dan *tepas parintah ageng*.²⁴ *Sowan* ini menjadi semacam wahana untuk memantau dan mengontrol abdi dalem. Ketika mereka rajin hadir untuk *sowan* maka mereka berhak untuk naik *kalenggahan*. Begitu juga sebaliknya. Kenaikan *kalenggahan* menjadi wujud kenaikan posisi mereka dalam struktur abdi dalem yang dibangun oleh Kraton Jogjakarta. Misalnya seseorang yang memiliki posisi *bupati nayaka* berhak menyandang gelar Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) untuk orang awam atau Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) untuk mereka yang memiliki silsilah keturunan darah biru/bangsawan. *Pranata kalenggahan* ini menjadi dasar bagi Kraton Jogjakarta dalam menentukan posisi dan nama pemberian bagi abdi dalem. Selain itu posisi *kalenggahan* ini menjadi rujukan bagi Kraton Jogjakarta dalam memberikan tugas pada abdi dalem. Seperti misalnya ketika tugas *parden* (menyerahkan *garebeg*) ke kepatihan atau ke puro pakualaman, Kraton Jogjakarta mensyaratkan hanya abdi dalem dengan posisi *kalenggahan* tertentu (misalkan bupati ke atas) yang berhak melaksanakan.

²⁴ Semacam bagian dalam struktur Kraton Jogjakarta yang mengurus abdi dalem keprajan (*dwarapura*) dan abdi dalem punokawan (*parintah ageng*).

Selain *serat kekancingan*, *peranakan* adalah wahana lain yang digunakan Kraton Jogjakarta untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku abdi dalem. *Peranakan* menjadi dasar bagi Kraton Jogjakarta untuk ‘mempersaudara’ para abdi dalem yang tidak memiliki hubungan darah dengan Kraton Jogjakarta. Apalagi konsep keluarga dalam masyarakat Jawa berfungsi memberikan semacam identitas kepada warganya, serta meninggikan kedudukan sosial maupun gengsinya. Masuknya para abdi dalem dalam lingkaran persaudaraan dengan Kraton Jogjakarta menjadi semacam legalitas bagi Kraton Jogjakarta untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku abdi dalem.

Para abdi dalem juga diberi kesempatan untuk belajar mengenai *wewangunan* maupun *pangertosan* Kraton Jogjakarta, membaca dan menulis huruf Jawa maupun berbagai *lampah-lampah* selama mereka *sowan* dengan mengenakan *peranakan*. Pembelajaran ini adalah bagian menularkan berbagai tradisi, norma, etika dan nilai kepada abdi dalem agar mereka berperilaku sesuai dengan tradisi, norma, etika, dan nilai yang berlaku. Ketika berbagai tradisi, norma dan perilaku ini terus terpelihara dengan jalan diajarkan, ditularkan dan dilaksanakan kepada mereka-mereka yang tergabung dalam abdi dalem maka ini menjadi salah satu alat ‘pendisiplinan’ atau ‘pengontrol’

bagi abdi dalem untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan tradisi, norma, etika dan nilai yang selama ini telah diajarkan kepada mereka.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *peranakan* dan *serat kekancingan* merupakan media 'pendisiplinan' atau 'pengaturan' bagi para abdi dalem. Ketika mereka setuju untuk menjadi abdi dalem dengan menerima *serat kekancingan*, maka mereka wajib menjalankan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya seperti *sowan*, mengikuti perayaan-perayaan tertentu, mematuhi *pranatan* yang ada dan sebagainya.

Selain itu dengan mengenakan pakaian *peranakan*, maka secara tidak langsung mereka seolah-olah 'dibatasi' untuk berperilaku seperti filosofi pakaian *peranakan*. Jika mereka mengenakan pakaian *peranakan*, maka sudah sewajarnya mereka harus bertingkah polah layaknya keluarga Kraton Jogjakarta. Mereka secara tidak langsung juga ikut melestarikan nilai, norma, pranata dan etika yang selama ini berlaku di Kraton Jogjakarta meski sebenarnya mereka bukan keluarga secara 'biologis' dengan Kraton Jogjakarta. *Serat kekancingan* dan *peranakan* mampu membuat mereka-mereka yang tergabung dalam abdi dalem bertingkah dan

berperilaku seperti yang diharapkan oleh Kraton Jogjakarta.

Daftar Pustaka

Dawuh Dalem angka 01/DD/HB.X/EHE-1932 tertanggal 29 Rejeb EHE 1932 atau 08 Nopember 1999.

Gordon, Colin 1991: Governmental rationality: an introduction, in: Graham Burchell/Colin Gordon/Peter Miller (eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, pp. 1-51.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2014. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Haryanto, Sindung. 2014. *Edelweiss Van Jogja: Pengabdian Abdidalem Keraton Yogyakarta dalam Perspektif Sosio-Fenomenologi*. Yogyakarta: Kepel Press.

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html> diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 13.36.

<http://www.nu.or.id/about/paham+k> eagamaan diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 12.45.

Jati, Wasisto Raharjo, 2012. *Kultur Birokrasi Patrimonialisme Dalam Pemerintahan Provinsi Daerah*

- Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Borneo Volume 8 Nomor 2.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lemke, Thomas 2001: "The Birth of Bio-Politics" – Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality, in: *Economy & Society*, Vol 30. No. 2, pp. 190-207.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pranatan Kalenggahan* angka 01/Pran/KHPP/2006 tanggal 27 Jumadil Akhir 1938 suryo kaping 27 Januari 2006.
- Pratelan urutan pangkat abdi dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat* angka 01/Pran/KHPP/2004 tanggal 15 Dulkaidah Wawu 1937 surya kaping 27 Desember 2004.
- Septi Satriani. "Punokawan dan Keprajan: Konsep Birokrasi Kerajaan dalam Keistimewaan Yogyakarta". <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/politik-lokal/394-punokawan-dan-keprajan-konsep-birokrasi-kerajaan-dalam-keistimewaan-yogyakarta.html>. Diakses pada Jum'at 27 Maret 2015. Pukul 11.44.
- Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Suwarno, P.J. 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wasesowinoto, KRT. 2006 *Lenggahe Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Minggu Pon 1 Besar Jumakir 1938.
- Wasesowinoto, KRT. 2008. *Permati Tata Lampah-tata Rakit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pasowanan-Parakan Padintenan Jilid 1*.
- Wasesowinoto, KRT. *Permati, Tata Lampah-tata Rakit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pasowanan Ngabekten Hageng Jilid 2*.